

KEBHINNEKAAN PADA PENARI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

¹Tomy Michael, ²Syofyan Hadi, ³Wiwik Afifah, ⁴Fransiscus Nanga Roka, ⁵Muhamad Khoirul Ma'arif,
⁶Anam Iman Aulia, ⁷Zidniy Ma Naviah, ⁸Alienda Maulidiantie
^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Kata Kunci:

Anak, bhinneka, hukum, penari

***Correspondence Address:**

tomy@untag-sby.ac.id

Abstrak: Kebhinnekaan adalah sikap penciri dari bangsa Indonesia. Terjadi kemajuan berpikir yang terus menerus ada sehingga penyerapan akan makna bhinneka menjadi lebih baik. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti sebagai beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Metode penelitian menggunakan peneltiannormatif sehingga ditemukan formula yang tepat dalam menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Pada akhirnya, penari anak adalah wadah yang harus diperhatikan oleh negara sehingga muncul kesetiaan akan makna ideologi itu sendiri.

PENDAHULUAN

Kebhinnekaan adalah sikap penciri dari bangsa Indonesia. Terjadi kemajuan berpikir yang terus menerus ada sehingga penyerapan akan makna bhinneka menjadi lebih baik. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti sebagai beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.(Pertiwi & Dewi, 2021) Wujud rasional itu menjadi bagian penting untuk diterapkan pada penari anak yang mereka adalah subjek hukum generasi muda salah satunya. Penguatan-penguatan akan makna Bhinneka Tunggal Ika dikombinasikan dengan gerakan tari di Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya.

Dalam perspektif hukum, ideologi Pancasila adalah wujud kesatuan bangsa. Sebenarnya sesuatu ideologi itu walaupun berasal dari pada hasil pemikiran seseorang

atau lebih, pada kenyataannya tidak terlepas dari pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat, bahkan pemikir itu tadi tidak akan dapat hidup dalam masyarakat. Jadi sesuatu pemikiran itu menunjukkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh hasil pemikiran itu sendiri.(surajiyo, 2020) Bagian penting ini menjadi penelusuran yang terus menerus sebagai bagian yang utuh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitiannormatif sehingga ditemukan formula yang tepat dalam menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri.(Tifoni & Michael, 2025) Kemudian menggunakan pendekatan undang-undang dan penafsiran hukum untuk memberikan kemudahan berpikir.(Michael, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kaidah ilmu hukum, ideologi adalah abstrak sehingga harus ada perwujudan kontekstual. Penari anak pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya menunjukkannya dengan Tari Sekar Pertiwi, tarian ini adalah pengembangan dari penelitian yang berawal dalam kaidah hukum. Tarian ini menggambarkan semangat patriotisme dalam diri seorang gadis remaja di tengah era modern. Gerak tari yang luhur selaras juga akan makna kebudayaan hukum. Seni memainkan peran penting dalam pembentukan prinsip moral dan hukum serta berkontribusi pada pengembangan budaya hukum.(Vasilyeva, 2024)

Tetapi untuk mengubah paradigma bahwa tarian tidak selalu dengan ideologi bahkan timbul pertentangan dengan negara maka negara harus menunjukkan eksistensi dirinya. Kajian yang luas dan luas tentang budaya populer ditemukan dalam pertemuan para sarjana hukum Amerika tahun 1992. Gerakan yang sedang berkembang ini meneliti film, televisi, opera ringan, studi perempuan, dan sastra. Pendekatannya secara umum tidak dilanjutkan, sebaliknya berfokus pada satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Misalnya adanya fenomena hukum yang itu menjadi peranan penting dalam mendeskripsikan makna tarian. Tarian pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya terus menerus berkembang. Para penari anak memiliki kemampuan yang itu adalah kelebihanannya.



Gambar 1 Penari Anak

Negara memiliki karya-karya dalam bidang-bidang yang berbeda yang berfokus pada

fenomena tunggal seperti film atau televisi. Beberapa bidang kurang mendapat perhatian misalnya karena tidak membawa nilai ekonomis atau bertentangan dengan ideologi kebhinnekaan itu sendiri. (Robson & Marusek, 2021)

KESIMPULAN

Pada akhirnya, penari anak adalah wadah yang harus diperhatikan oleh negara sehingga muncul kesetiaan akan makna ideologi itu sendiri. Tidak terdapat kesenjangan hukum namun harus ada korelasi antara pengetahuan hukum dan ilmu hukum.

REFERENSI

- Michael, T. (2025). Kewajiban Asasi Manusia Sebagai Efektivitas Menuju Indonesia Emas 2045. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 160–172. <https://doi.org/10.61579/FUTURE.V3I1.324>
- Pertiwi, A. D., & Dewi, D. A. (2021). IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN BHINNEKA TUNGGAL IKA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 212–221. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1450>
- Robson, P., & Marusek, S. (2021). Law, Popular Culture and the Arts in the 21st Century. *International Journal for the Semiotics of Law*, 34(1), 1–5. <https://doi.org/10.1007/S11196-020-09785-8/METRICS>
- surajiyo. (2020). Keunggulan Dan Ketangguhan Ideologi Pancasila. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 145–155.
- Tifoni, V. D., & Michael, T. (2025). Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia. *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1(2), 58–75. <https://doi.org/10.59066/PRLJ.V1I2.932>
- Vasilyeva, E. N. (2024). Interaction of legal culture and art. *Heritage and Modern Times*, 6(4), 405–410. <https://doi.org/10.52883/2619-0214-2023-6-4-405-410>